



Disparitas Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan di Tahun Pandemi

Lahmodin Oktanata

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara

Article Infortion

Article history:

Received 07 Agustus 2021;

Received in revised form 09

September 2021; Available online

29 January 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze HDI achievements, HDI disparities, and regional characteristics based on HDI achievements in South Sumatra Province. This research is a quantitative descriptive study using secondary data from the official website www.bps.go.id. This study uses an Interval Scale, Williamson Index, and Klassen Typology. The results show that the decline in the purchasing power of the people of South Sumatra in 2020 has contributed to the contraction of HDI growth in South Sumatra Province. The disparity in human development in South Sumatra Province in the 2016-2020 period shows a declining trend. Klassen's Typology analysis result shows: 1) fast growing areas are Ogan Komering Ulu and Muara Enim Regency; 2) developed but distressed areas are Palembang City, Prabumulih City, Lubuk Linggau City, and OKU Timur Regency; 3) developing areas are Musi Rawas Regency, Banyuasin Regency, OKU Selatan Regency, Ogan Ilir Regency, Penukal Abab Lematang Ilir Regency, Musi Rawas Utara Regency, and Pagar Alam City; and 4) relatively underdeveloped areas are Ogan Komering Ilir Regency, Lahat Regency, Musi Banyuasin Regency, and Empat Lawang Regency.

Keywords: Disparities, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Pandemic, South Sumatra

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian IPM, disparitas IPM, dan karakteristik wilayah berdasarkan Capaian IPM di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari situs resmi www.bps.go.id. Penelitian ini menggunakan Skala Interval, Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa turunnya daya beli masyarakat Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah berkontribusi terhadap kontraksi pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan. Disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Analisis Tipologi Klassen menghasilkan klasifikasi wilayah: 1) daerah tumbuh pesat adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim; 2) daerah maju tapi tertekan adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten OKU Timur; 3) daerah berkembang adalah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam; dan 4) daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang.

Kata kunci: Disparitas, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Pandemi, Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan *Human Development Report* (HDR). Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang di prakarsai oleh UNDP ini tidak hanya menempatkan manusia sebagai subjek dari program pembangunan tetapi juga merupakan objek yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. HDR juga merekomendasikan pengukuran pembangunan manusia yang disebut

sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 2014, Indonesia telah melakukan penghitungan IPM dengan metode baru, yaitu mengganti metode agregasi rata-rata aritmatik menjadi metode agregasi rata-rata geometrik. Sejak tahun itu juga IPM disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (BPS, 2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Tidak hanya

Author Correspondence:

E-mail: lahmodin@bps.go.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.310>

sektor ekonomi yang mengalami resesi di berbagai negara, namun juga berdampak terhadap laju pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu hanya tumbuh sebesar 0,03 persen, sangat melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen pada tahun 2019 (BPS, 2021).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami dampak negatif terhadap pertumbuhan IPM di tahun 2020. Berbeda dengan capaian nasional, pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai angka 70,01 (mengalami kontraksi 0,01 persen) dari tahun 2019 yang mencapai 70,02. Angka tersebut cukup mempertahankan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan masih termasuk ke dalam kategori IPM tinggi. Kendatipun demikian, secara nasional Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat 23 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam, bagaimanakah laju pertumbuhan IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2020?, bagaimanakah kecenderungan disparitas IPM di Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2020? Bangun (2021) mengatakan bahwa permasalahan ketimpangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan manusia termasuk objek penelitian penting. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan temuan baru sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk penyusunan program pembangunan di daerah.

Penelitian tentang pembangunan manusia sudah banyak dilakukan, diantaranya Bangun (2021) tentang disparitas pembangunan manusia di Sumatera Utara, Bano (2019) tentang laju pembangunan manusia di Provinsi Papua, Hermawati (2019) tentang disparitas Indeks Pembangunan Manusia, Sitorus & Aidar (2018) tentang analisis disparitas pembangunan manusia pada lima kota di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, penelitian IPM juga dilakukan oleh Pambudi (2020) tentang keterkaitan IPM terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, Utami (2020) tentang pengaruh IPM, kemiskinan dan pengangguran terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, Sitanggang (2020) tentang pengaruh IPM dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Bemby dan Bashir (2015) yang melakukan penelitian tentang tipologi dan hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, namun dalam penelitian tersebut masih menggunakan angka IPM hasil penghitungan dengan metode lama. Sehingga perlu dilakukan kembali penelitian sejenis yang menggunakan angka IPM hasil penghitungan dengan metode baru, agar dapat mencerminkan nilai yang lebih sesuai dengan variabel pembentuk IPM saat ini. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis capaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan, namun juga melihat kecenderungan disparitas IPM dan karakteristik capaian IPM terhadap laju IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

IPM adalah angka nilai yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Juliarini (2019) IPM yang tinggi menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang juga tinggi. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi pembentuknya yaitu dimensi kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan yang dihitung dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh Pengeluaran Per Kapita (PPK) yang telah disesuaikan (BPS, 2021).

Umur Harapan Hidup (UHH) sejak lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. Tingginya angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan tingginya kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu maksimum 85 tahun dan minimum 20 tahun (BPS, 2021).

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak berumur 7 tahun ke atas,

sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Indeks HLS dihitung berdasarkan batasan nilai maksimum dan minimum yang sesuai dengan standar UNDP yaitu maksimum 18 tahun dan minimum 0 tahun, sedangkan batasan nilai maksimum penghitungan RLS adalah 15 tahun dan minimum 0 tahun (BPS, 2021).

Pengeluaran Per Kapita (PPK) yang disesuaikan adalah angka nilai yang menunjukkan standar hidup layak masyarakat. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dihitung dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Dari ketiga dimensi pembentuk IPM, hanya dimensi standar hidup layak yang batasan nilai maksimum dan minimumnya tidak sama dengan ketentuan UNDP, namun disesuaikan dengan daya beli masyarakat di Indonesia (BPS, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis secara deskriptif tentang capaian dan disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung berdasarkan data-data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk kebutuhan analisis ini maka digunakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik, meliputi data IPM dan data komponen pembentuk IPM seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita (PPK) yang telah disesuaikan dengan referensi waktu 2016-2020.

Untuk melihat ada tidaknya disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan maka digunakan skala interval yang dibuat berdasarkan sebaran data IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sekaran (2006), menyatakan bahwa untuk menetapkan selisih atau kesenjangan dan besaran pada setiap faktor yang memiliki jarak tertentu maka digunakanlah skala interval. Nantinya skala interval akan di kategorikan ke dalam empat kategori IPM yaitu;

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nilai jenjang interval dihitung dengan formula dibawah ini (Lestari, 2019).

Jenjang Interval = IPM Tertinggi - IPM Terendah Jumlah Kategori.

Kecenderungan disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan diukur dengan menggunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut (Syafrizal, 2008)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=n}^n (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita di daerah i

Y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk di daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Untuk menghitung kecenderungan disparitas IPM di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan modifikasi terhadap variabel Y_i (PDRB perkapita di daerah i) dan variabel Y (PDRB perkapita rata-rata di seluruh daerah). Dengan demikian variabel Y_i (PDRB perkapita di daerah i) digantikan dengan variabel IPM_i (IPM di kabupaten/kota i) dan variabel Y (PDRB perkapita rata-rata di seluruh daerah) digantikan dengan variabel IPM_r (IPM rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan), sehingga diperoleh rumus Indeks Williamson yang telah dimodifikasi sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=n}^n (IPM_i - IPM_r)^2 \frac{f_i}{n}}}{IPM_r}$$

IW = Indeks Williamson

IPM_i = IPM di daerah i

IPM_r = Rata-rata IPM kabupaten/kota

f_i = Jumlah penduduk di daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Selanjutnya untuk mengukur disparitas masing-masing komponen pembentuk IPM formulasi yang digunakan pada dasarnya adalah sama. Untuk menghitung disparitas masing-masing komponen pembentuk IPM, kita hanya perlu mengganti variabel IPM_i (Indeks Pembangunan Manusia di

daerah i) dan variabel IPMr (Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota) dengan variabel-variabel pembentuk IPM pada tiap komponennya. Pada komponen kesehatan kita hanya mengganti variabel IPMi dengan variabel IKi (Indeks Kesehatan di daerah i) dan variabel IPMr diganti dengan IKr (rata-rata indeks kesehatan kabupaten/kota). Pada komponen pendidikan variabel IPMi diganti dengan IPI (indeks pendidikan di daerah i), variabel IPMr diganti dengan IPr (rata-rata indeks pendidikan kabupaten/kota). Pada komponen standar hidup layak variabel IPMi diganti dengan variabel IEi (indeks pengeluaran di daerah i), variabel IPMr diganti dengan variabel IEr (rata-rata indeks pengeluaran kabupaten/kota).

Untuk melihat karakteristik IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan maka digunakan analisis Tipologi Klassen. Tipologi Klassen diadopsi dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan dua karakteristik yaitu: capaian IPM dan laju IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan analisis Tipologi Klassen diperoleh empat kuadran wilayah dengan karakteristik berbeda yaitu: kuadran I merupakan daerah maju dan tumbuh pesat, kuadran II merupakan daerah maju tapi tertekan, kuadran III merupakan daerah berkembang, dan kuadran IV merupakan daerah yang relatif tertinggal. Kuadran Tipologi Klassen dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kuadran Tipologi Klassen

Laju IPM \ Capaian IPM	($Y_i > Y$)	($Y_i < Y$)
($X_i > X$)	(I)	(II)
($X_i < X$)	(III)	(IV)

Sumber: Syafrizal, (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

IPM adalah angka nilai yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Juliarini (2019) mengatakan bahwa IPM yang tinggi menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang juga tinggi. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi pembentuknya yaitu dimensi kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan yang dihitung dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh Pengeluaran Per Kapita (PPK) yang disesuaikan (BPS Sumsel, 2021).

Pandemi Covid-19 yang telah menerpa hampir seluruh negara di dunia berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ekonomi di berbagai negara mengalami tekanan berat bahkan terjadi resesi. Pertumbuhan IPM pun tak luput dari dampak Pandemi Covid-19 yang telah terjadi. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami dampak negatif terhadap pertumbuhan IPM di tahun 2020.

Secara umum kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan (Tabel 2). Pada tahun 2016 IPM Provinsi Sumatera Selatan mencapai angka 68,24 dan termasuk kategori IPM sedang. Selama lima tahun terakhir angka tersebut terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun. Pada tahun 2019 capaian IPM Provinsi Sumatera Selatan menyentuh angka 70,02 dan masuk ke dalam kategori IPM tinggi. Hal yang tak lazim terjadi pada tahun 2020, pada tahun tersebut pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan tumbuh negatif. Kontraksi pertumbuhan pembangunan manusia ini merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah pertumbuhan IPM di Provinsi Sumatera Selatan, fakta ini berdasarkan data yang di release oleh BPS dalam tabel dinamis IPM 2010-2020 (www.bps.go.id).

Jika dilihat dari dimensi pembentuk IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 pada Tabel 2, dimensi kesehatan yang diukur berdasarkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), kedua dimensi pembentuk IPM Provinsi Sumatera Selatan ini tetap tumbuh positif kendatipun lajunya melambat pada tahun 2020. Sementara dimensi standar hidup layak yang dihitung berdasarkan Pengeluaran Per Kapita (PPK) yang disesuaikan, dimensi ini mengalami kontraksi atau tumbuh

negatif di tahun 2020 dan hal inilah yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar -0,01 persen.

Kontraksi dimensi standar hidup layak yang disebabkan oleh turunnya Pengeluaran Per Kapita (PPK) sejalan dengan fenomena Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah pada awal tahun 2020. Menurut Olivia (2020) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi telah menyebabkan pengeluaran perkapita masyarakat Sumatera Selatan berkurang sebesar Rp 285.000 pada tahun 2020. Capaian pembangunan manusia Sumatera Selatan dan unsur pembentuknya kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sumatera Selatan

Dimensi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
UHH (Tahun)	69,16	69,18	69,41	69,65	69,88
RLS (Tahun)	7,83	7,99	8,00	8,18	8,24
HLS (Tahun)	12,23	12,35	12,36	12,39	12,45
PPK (Rp Juta)	9,94	10,22	10,65	10,94	10,65
IPM	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Dimensi kesehatan yang dihitung berdasarkan umur harapan hidup sejak lahir, Sugiantari dan Budiantara (2013) menyatakan bahwa umur harapan hidup sejak lahir adalah angka nilai yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sisi sarana, akses dan kualitas kesehatan. Umur harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus menunjukkan trend positif dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,26 persen per tahun. Umur harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai 69,88 tahun, hal ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peluang untuk bertahan hidup hingga 69,88 tahun ke depan, sementara umur harapan hidup secara nasional mencapai 71,47 tahun.

Dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan agregasi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menunjukkan trend positif selama rentang waktu 2016-2020. Rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai angka 8,24 tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,29 persen per tahun, hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk berusia 25

tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah menempuh pendidikan selama 8,24 tahun atau setara dengan kelas III SLTP. Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai 12,45 tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,45 persen per tahun selama lima tahun terakhir, hal ini berarti bahwa setiap anak yang berusia 7 tahun ke atas yang masuk ke dunia pendidikan mempunyai harapan menempuh pendidikan hingga tamat SLTA bahkan mencapai Diploma I.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, selama kurun waktu 2016-2020 pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Selatan secara umum tetap menunjukkan trend positif dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,79 persen per tahun. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Selatan mencapai 10,65 juta rupiah per tahun, angka tersebut turun hingga 2,61 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,94 juta rupiah per tahun di tahun 2019. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan keadaan dengan membuat berbagai kebijakan, diantaranya adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi mobilisasi masyarakat guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Namun penerapan PSBB juga berdampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, turunnya aktivitas ekonomi ini memaksa masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluarannya yang berujung pada menurunnya daya beli masyarakat di tahun 2020, hal inilah yang secara agregat berkontribusi terhadap turunnya IPM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020.

Kontraksi pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 juga diikuti oleh sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara bervariasi, tercatat sebanyak 10 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan IPM di tahun 2020, sementara 3 kabupaten dan 1 kota lainnya tetap tumbuh positif. Kabupaten yang mengalami kontraksi pertumbuhan IPM antara lain adalah: Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin,

Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Ilir. Kota yang mengalami kontraksi pertumbuhan IPM antara lain adalah: Palembang, Lubuk Linggau dan Pagar Alam. Sementara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Prabumulih tetap tumbuh positif. Capaian IPM kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 bervariasi, Kota Palembang tercatat dengan capaian IPM paling tinggi yaitu 78,33 dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan capaian IPM paling rendah yaitu 64,49. Berdasarkan kriteria kategori IPM, capaian IPM kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya berkisar di kategori sedang dan tinggi. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, hingga tahun 2020 hanya tiga kota yang masuk kategori tinggi yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau, sementara kabupaten/kota lainnya termasuk kategori sedang. Sedangkan hasil pengkategorian IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (dengan skala interval)

Kabupaten / Kota	Kategori
Ogan Komering Ulu	Sedang
Ogan Komering Ilir	Rendah
Muara Enim	Sedang
Lahat	Sedang
Musi Rawas	Rendah
Musi Banyuasin	Sedang
Banyuasin	Rendah
Ogan Komering Ulu Selatan	Rendah
Ogan Komering Ulu Timur	Sedang
Ogan Ilir	Rendah
Empat Lawang	Rendah
Penukal Abab Lematang Ilir	Rendah
Musi Rawas Utara	Rendah
Kota Palembang	Sangat Tinggi
Kota Prabumulih	Sangat Tinggi
Kota Pagar Alam	Sedang
Kota Lubuk Linggau	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (diolah)

Hasil pengkategorian berdasarkan skala interval menunjukkan bahwa ada disparitas IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 8 kabupaten termasuk kategori rendah, 5 kabupaten dan 1 kota termasuk kategori sedang, dan 3 kota termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, dalam hal ini tidak ada satupun kabupaten atau kota yang masuk ke dalam kategori tinggi.

Untuk melihat disparitas capaian IPM antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, maka digunakan skala interval berdasarkan sebaran data capaian IPM kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Skala interval yang digunakan mengklasifikasikan kategori capaian IPM kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan menjadi empat kategori yaitu: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 menunjukkan masih adanya disparitas. Kesenjangan yang terjadi cukup jauh, khususnya antara wilayah kabupaten yang lebih banyak masuk ke dalam kategori rendah dan wilayah kota yang lebih banyak masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Disparitas ini terlihat jauh karena tidak ada satupun kabupaten atau kota masuk kategori tinggi. Evianto (2010) menyatakan bahwa faktor tersedia dan mudahnya akses adalah salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya disparitas pembangunan manusia antar daerah.

Untuk melihat kecenderungan disparitas IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan komponen pembentuknya selama rentang waktu 2016-2020, maka dilakukan penghitungan koefisien variasi dengan menggunakan Indeks Williamson. Taryono (2014) telah menggunakan koefisien variasi Indeks Williamson untuk melihat disparitas IPM dan komponen pembentuk IPM di Provinsi Riau tahun 2004-2012.

Tabel 4. Indeks Williamson IPM dan Pembentuk IPM Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
IW IPM	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
IW Kesehatan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
IW Pendidikan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
IW Ekonomi	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (diolah)

Berdasarkan penghitungan koefisien variasi dengan Indeks Williamson terhadap angka IPM dan komponen pembentuk IPM kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.

Pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan selama rentang waktu 2016-2020 menunjukkan disparitas dengan *Trend* yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 koefisien variasi Indeks Williamson IPM sebesar 0,0725, nilai koefisien variasi Indeks Williamson terus bergerak turun hingga mencapai angka 0,0702 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kendatipun masih ada disparitas namun nilainya makin mengecil. Begitu juga dengan komponen pembentuk IPM, nilai koefisien variasi masing-masing komponen secara umum juga memiliki kecenderungan menurun.

Dimensi kesehatan yang diukur berdasarkan umur harapan hidup memiliki koefisien variasi Indeks Williamson pada tahun 2016 sebesar 0,0379, hingga tahun 2020 nilainya turun menjadi 0,0363. Dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2016 dengan nilai koefisien variasi Indeks Wiliamson sebesar 0,1152, pada tahun 2020 turun menjadi 0,1159. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan, nilai koefisien variasi Indeks Williamson pada tahun 2016 sebesar 0,0849, hingga tahun 2020 turun menjadi 0,0769. Secara umum dapat dikatakan bahwa disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu 2016-2020 cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taryono (2014) yang meneliti tentang disparitas pembangunan manusia di Provinsi Riau rentang waktu 2004-2012 yang menunjukkan hasil disparitas cenderung menurun.

Untuk melihat karakteristik pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini mengadopsi Tipologi Klassen. Analisis dengan Tipologi Klassen ini dilakukan untuk melihat pola hubungan antara capaian IPM terhadap laju IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kebutuhan ini modifikasi dilakukan dengan mengganti laju pertumbuhan ekonomi dengan laju pembangunan manusia, dan mengklasifikasikan daerah menjadi empat kuadran yaitu: 1) daerah dengan IPM tinggi dan laju IPM tinggi; 2) daerah dengan IPM tinggi dan laju IPM rendah; 3) daerah dengan IPM rendah dan laju IPM

tinggi; dan 4) daerah dengan IPM rendah dan laju IPM rendah.

Karakteristik capaian pembangunan manusia pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, di klasifikasikan berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan IPM dalam rentang waktu 2016-2020. Indikator suatu kabupaten/kota dikatakan “tinggi” jika lebih tinggi dari rata-rata indikator seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan dikatakan “rendah” jika nilai indikator tersebut lebih rendah dari rata-rata indikator seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tipologi Klassen dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Klasifikasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan menurut Tipologi Klassen

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (diolah)

Laju IPM Capaian IPM	($Y_i > \bar{Y}$)	($Y_i < \bar{Y}$)
($X_i > \bar{X}$)	(I) Ogan Komering Ulu Muara Enim	(II) Palembang Prabumulih Lubuk Linggau OKU Timur
($X_i < \bar{X}$)	(III) Musi Rawas Banyuasin OKU Selatan Ogan Ilir PALI Muratara Pagar Alam	(IV) OKI Lahat Musi Banyuasin Empat Lawang

Kuadran I merupakan wilayah dengan capaian IPM diatas rata-rata dan laju IPM diatas rata-rata. Wilayah yang masuk ke dalam kuadran ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim. Kendati mengalami kontraksi pertumbuhan IPM di tahun 2020, namun secara rata-rata pertumbuhan IPM kedua wilayah tersebut dalam rentang waktu 2016-2020 masih termasuk kategori tinggi. Capaian IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2020 sebesar 66,82 dan menempati peringkat 4 di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan capaian IPM Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 sebesar 68,74 dan menempati peringkat 6 di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang maju pesat dalam hal pembangunan manusia dalam rentang waktu penelitian.

Kuadran II merupakan wilayah dengan capaian IPM tinggi namun laju IPM dibawah rata-rata. Wilayah yang masuk ke dalam kuadran II antara lain adalah: Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari keempat wilayah yang masuk ke dalam kuadran II, hanya Kota Prabumulih yang laju IPM pada tahun 2020 tumbuh positif, wilayah lainnya mengalami kontraksi. Jika diperhatikan lebih jauh, ternyata wilayah dengan status kota dengan capaian IPM tinggi, lebih dominan masuk ke dalam kuadran II. Keempat wilayah tersebut dapat dikategorikan wilayah maju tapi tertekan dalam hal pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

Kuadran III merupakan wilayah dengan capaian IPM rendah namun laju IPM diatas rata-rata. Wilayah yang masuk kuadran III ini lebih banyak bahkan hampir separuh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan seperti: Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam. Wilayah yang masuk ke dalam kuadran III ini merupakan wilayah potensial dan masih bisa dikembangkan lagi dalam hal pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan fasilitas-fasilitas publik untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sarana ekonomi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat masih berpotensi untuk dikembangkan di wilayah-wilayah ini.

Kuadran IV merupakan wilayah dengan capaian IPM lebih rendah dan laju IPM dibawah rata-rata. Perlu upaya yang ekstra dari pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai IPM di wilayah ini. Empat wilayah yang masuk kedalam kuadran IV ini antara lain adalah: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan klasifikasi Tipologi Klassen, wilayah-wilayah tersebut termasuk wilayah yang relatif tertinggal dalam hal pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bemby & Bashir (2015) yang mengelompokkan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan karakteristik IPM dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun salah satu variabel yang digunakan

dalam klasifikasi wilayah berbeda, penelitian tersebut menggunakan angka IPM hasil hitungan dengan metode lama, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang nyata antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini sudah dapat melihat kecenderungan disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan yang semakin turun, serta sudah dapat mengklasifikasikan tipologi wilayah berdasarkan capaian dan pertumbuhan IPM yang dihitung dengan metode baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada studi diatas, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Kontraksi pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 disebabkan oleh turunnya Pengeluaran Per Kapita (PPK) sebesar Rp 285.000 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.
2. Berdasarkan penghitungan skala interval, diperoleh hasil bahwa: 8 kabupaten termasuk kategori rendah, 5 kabupaten dan 1 kota termasuk kategori sedang, dan 3 kota termasuk kategori sangat tinggi, dalam hal ini tidak ada kabupaten atau kota yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020. Disparitas IPM dan komponen pembentuknya dalam rentang waktu 2016-2020 yang dihitung dengan Indeks Williamson, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.
3. Tipologi wilayah pembangunan manusia berdasarkan karakteristik capaian IPM terhadap laju IPM menghasilkan antara lain: 1) daerah maju dan tumbuh pesat yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim; 2) daerah maju tapi tertekan yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 3) daerah potensial berkembang yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, dan Kota Pagar Alam; dan 4) daerah yang relatif tertinggal yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh wilayah termasuk kriteria daerah berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2021) Indeks Pembangunan Manusia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan (2021) Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2020. Palembang: CV Pensil Kreasi.
- Bangun, R.H. (2021) Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(1): 75-84.
- Bangun, R.H. (2020). Determinan Peningkatan Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(1): 32-39.
- Bano, Raffly P. (2019). Analisis Laju Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Unmus*, 8(1): 22-31.
- Bemby, B dan Abdul Bashir (2015). Analisis Tipologi dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1): 21-36.
- Evianto, Evan. (2010). Disparitas Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Universitas Indonesia.
- Hermawati, E. (2019). Disparitas Pembangunan Manusia. *Prosiding Universitas Tidar*.
- Hasibuan, Lailan. S, Rujiman dan Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2): 139-146.
- Hakiki, A, Yulmardi dan Zulfanetti. (2020). Estimasi Model Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3): 32-45.
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 15(1): 934-957.
- Lestari, Suci. I, (2019) Disparitas Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
- Maulana, A, Renny Meilawati dan Vita Widyastuti. (2019). Permodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Menurut Provinsi tahun 2015 Menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR). *Indonesian Journal Of Applied Statistic*, 2(1): 21-33.
- Olivia, Siska. (2020) Pembangunan Manusia Sumatera Selatan di Tengah Pandemi Covid-19. *Sumatera Ekspres-Opini*, Edisi 30 Desember 2020.
- Pambudi, Ari. P. (2020). Analisis Keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 2(1): 109-123.
- Prasetyoningrum, Ari. K. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2): 217-240.
- Palindangan, Jeni dan Abu Bakar. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1): 65-80.
- Sitorus, Fazlur. R dan dan Nur Aidar. (2018). Disparitas Pembangunan Manusia Studi Kasus pada Lima Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3): 294-305.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Syafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiantari, A.P dan Budiantara, I.N. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Jawa Timur. *Jurnal sains dan Seni ITS*, 2(1): 37-41.
- Sitanggang, Dessi. C.E. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian*, 4(2): 225-232.
- Suriadi, M. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Wajo. *UMM Makassar*.
- Taryono, T. (2014). Analisis Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 4(11): 194-214.
- Utami, Farathika. P. (2020). Pengaruh Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2): 101-113.

Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 8(2): 32-50.